

## RINGKASAN

**Implementasi Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay Satu Dengan Kartu Kredit Pemerintah Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I**, Hammiya Iffatah Kolbiya, NIM D42200602, Tahun 2024, halaman, Akuntansi Sektor Publik, Bisnis, Politeknik Negeri Jember, Endro Sugiartono, S.E., M.M. (Dosen Pembimbing). Laporan magang ini ditulis untuk memberikan gambaran mengenai hasil pekerjaan yang sudah dilaksanakan selama kegiatan magang berlangsung dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr., Ak). Adapun tujuan khusus dari laporan ini adalah meningkatkan keterampilan implementasi penggunaan uang persediaan melalui Digipay Satu dengan Kartu Kredit pemerintah (KKP) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I Tipe A1 merupakan kantor yang bergerak dibidang keuangan dibawah kuasa Bendahara Umum Negara (BUN), selain sebagai kuasa BUN daerah KPPN juga bertindak sebagai Satuan Kerja (Satker). KPPN Semarang I selaku Satker juga memerlukan belanja sebagai penunjang dalam menjalankan kegiatan operasional, baik belanja pegawai, belanja perjalanan dinas dan belanja barang dan jasa. *Digital payment – Marketplace* atau dikenal dengan Digipay Satu merupakan transformasi belanja pemerintah khusus untuk Uang Persediaan (UP) di era *cashless*. Digipay Satu menjadi langkah awal penyedia *platform* pengadaan barang/jasa yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan sitem pembayaran menggunakan KKP dan/atau CMS VA yang bekerjasama dengan bank Himbara guna mewujudkan inovasi pembangunan ekosistem digitalisasi belanja negara.

KPPN Semarang I telah mengimplementasikan penggunaan uang persediaan melalui Digipay Satu dengan KKP meskipun masih belum maksimal. Implementasi KKP sendiri masih terbilang sangat rendah yaitu sebesar 9,49% dan digunakan untuk pembayaran di Digipay Satu hanya sebesar 1,05% selama bulan April sampai Desember tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan adanya indikasi permasalahan yang timbul dalam implementasi penggunaan uang persediaan melalui digipay, yakni *Platform* Digipay Satu yang tidak *user Friendly* dikarenakan banyaknya *user* yang harus didaftarkan dan minimnya vendor yang mendaftar *user*, Regulasi Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) yang kurang efektif, dan adanya biaya yang lebih tinggi yang akan dikeluarkan baik oleh pemesan ataupun vendor, serta SDM yang masih asing dengan *platform* Digipay Satu.

Guna mengatasi permasalahan tersebut maka terdapat rekomendasi yang dapat dilakukan, yaitu Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Digipay Satu kepada vendor, dilakukannya pengadaan barang dan jasa secara berkala di Digipay Satu, Adanya simplikasi proses bisnis dan *user, Platform* belanja pemerintah dijadikan satu *platform* dan Penguatan regulasi terkait besaran penggunaan digipay dan pengawasan pengendalian.